

## PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL

Erna Santoso  
*ernasntso@gmail.com*

Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

### ABSTRACT

*Reformation has brought changes to the form of government in Indonesia, which in the beginning it was centralization now it becomes decentralization structure. The local government is given wide rights and authorization to manage their own local business and the local government is required to maximize their local potential to fulfill their local expenditure including the capital expenditure. Therefore, this research is meant to test whether the economic growth, local own source revenue, and Balance fund give influence to the capital expenditure to the districts / cities in East Java. The population is all the districts / cities in East Java and the secondary data and the sample collection technique has been carried out by using purposive sampling method. Based on the predetermined criteria 108 from 36 districts / cities in East Java, with the observation term is 3 years from 2013 to 2015 have been selected as samples. The analysis method has been conducted by using multiple linear regressions analysis and the application instrument of Statistical Product and Service Solutions (SPSS). The result of this research shows that economic growth does not have any influence to the capital expenditure. Meanwhile, local own source revenue and balance fund has positive influence to the capital expenditure. Simultaneously, the independent variables have significant influence to the dependent variable with its significance level is 0,000.*

*Keywords: Economic growth, Local own source revenue, balance fund, capital expenditure.*

### ABSTRAK

Reformasi telah membawa perubahan terhadap bentuk pemerintahan di Indonesia yang awalnya sentralisasi menjadi struktur desentralisasi. Dimana pemerintah daerah diberikan hak dan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta dituntut untuk lebih memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan belanja daerahnya termasuk belanja modal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur dengan menggunakan data sekunder dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam penelitian ini di peroleh sampel sebanyak 108 dari 36 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dengan jangka waktu pengamatan 3 tahun dari periode tahun 2013 - 2015. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Secara simultan, variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal.

### PENDAHULUAN

Reformasi yang bergulir tahun 1998 di Indonesia telah membuat perubahan politik dan administrasi, salah satu bentuk reformasi tersebut adalah perubahan bentuk pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur yang terdesentralisasi. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Pemberian otonomi daerah tersebut berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan- kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Pertumbuhan Ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Dengan kata lain apabila pertumbuhan ekonomi baik, juga dapat dilihat dari pendapatan per individu ketika semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat semakin tinggi pula tingkat konsumtif masyarakat untuk membeli barang, dari pembelian barang tersebut masyarakat akan dikenakan pajak. Dimana pajak itu sendiri dinamakan pajak daerah yang dapat menambah pendapatan asli daerah sehingga nantinya digunakan untuk pengeluaran belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat pula, dan juga akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Sehingga dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan Ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Secara implisit, peraturan perundang-undangan merupakan perjanjian antara eksekutif, legislative, dan publik. Dimana dalam penetapan UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan tegas memisahkan fungsi Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Dimana Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang mempunyai kewajiban membuat rancangan APBD, Sedangkan legislatif mempunyai kewajiban mensahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan rumah tangganya secara mandiri serta pelaksanaan pelayanan publik, maka dibentuklah anggaran daerah.

Di Indonesia, anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No.33 Tahun 2004 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada hakekatnya mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan setiap masing-masing daerah. Perimbangan keuangan sebenarnya memiliki pengertian yang cukup luas, yaitu bahwa pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan dalam suatu bentuk keadilan *horizontal* maupun *vertical* dan berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah seperti dari sisi keuangan yang lebih baik menuju terwujudnya *good governance*. Dengan demikian desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik.

Dalam mengukur keberhasilan pengembangan otonomi di daerah, dapat dilihat dengan cara membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan APBD yang diterima setiap tahunnya. Apabila Pendapatan Asli Daerah dari suatu daerah tersebut mampu memberikan kontribusi terbesar dalam pemasukan belanja daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang cukup maju dan bagus dari sektor ekonomi dan begitu pula sebaliknya. Di satu pihak beberapa daerah tergolong sebagai daerah yang beruntung karena memiliki sumber-sumber penerimaan yang potensial bagi daerahnya. Di lain pihak, banyak daerah yang memiliki kemampuan finansial yang jauh memadai sehingga mengakibatkan daerah-daerah semacam ini mengalami kesulitan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerahnya, sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal.

Pergeseran dalam komposisi belanja daerah merupakan upaya yang logis dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini bertujuan untuk meningkatkan asset tetap yang berupa peralatan, bangunan, dan infrastruktur. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena asset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal.

## TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

### Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya. Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah

termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Darise, 2009).

### **Desentralisasi Fiskal**

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 8, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **Anggaran Daerah**

Anggaran menurut Mardiasmo (2002) adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran daerah adalah salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua yaitu anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan antara lain belanja umum, belanja operasi dan belanja pemeliharaan. Dan anggaran modal yang menunjukkan anggaran jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan dan sebagainya. belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah asset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban pemerintah daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Suryana (2000) pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kemampuan jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut UU No. 32 tahun 2004, PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk

memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Dana Perimbangan**

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) itu terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, menjelaskan bahwa besaran DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional, dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja langsung dalam APBN/APBD. Menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama yang terdiri dari: Pertama, Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. Kedua, Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan /penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Ketiga, Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Keempat, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan atau penggantian atau peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan,

pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Dan kelima, Belanja Modal Fisik lainnya merupakan Belanja Modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal**

Dalam menghadapi desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah (Saragih, 2003 ; Kuncoro, 2004). Apabila Pertumbuhan Ekonomi baik maka Pemerintah Daerah akan meningkatkan alokasi Belanja Modal untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Seperti yang diungkapkan Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat tanpa muatan kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah (Soekarwo, 2003).

Darwanto dan Yustikasari (2007) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Daerah se Jawa-Bali baik Kabupaten dan Kota pada tahun 2004-2005. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua adalah:

H<sub>2</sub>: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

#### **Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Antar Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat maka daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimilikinya untuk membiayai

belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah daerah yaitu meningkatkan pelayanan publik.

Kadafi (2013) mengungkapkan bahwa dana perimbangan berdasarkan Uji F dan Uji t, berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kota Bandung Tahun anggaran 2003-2011. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis ketiga adalah:

H<sub>3</sub>: Dana Perimbangan (DP) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertumbuhan Ekonomi yang lengkap 3 tahun periode 2013-2015.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Variabel Independen**

##### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk peningkatan yang berkelanjutan PDRB (Saragih, 2003 ; Kuncoro, 2004).

##### **b. Pendapatan Asli Daerah**

PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (UU No. 32 tahun 2004).

##### **c. Dana Perimbangan**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Antar Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN yang terdiri dari: (1) Dana Alokasi Umum, (2) Dana Alokasi Khusus, dan (3) Dana Bagi Hasil.

#### **Variabel Dependen**

##### **Belanja Modal**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, Belanja Modal adalah belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin

seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan serta Belanja Modal Fisik lainnya.

### **Teknik Analisis Data**

#### **Uji Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan serta memberikan gambaran atau deskripsi pada suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum.

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Penelitian ini menggunakan analisis normal probability plot dan uji Kolmogrov-Smirnov dengan berpedoman apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka distribusi data normal dan apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  maka distribusi data tidak normal.

##### **Uji Multikolinieritas**

Jika model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance value*  $> 0,10$  dan VIF  $< 10$  maka tidak terjadi multikolinieritas.

##### **Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier, terdapat korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Pada uji ini menggunakan uji *statistic* Durbin Watson dengan ketentuan nilai DW berada diantara  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi.

##### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji statistik ini yang digunakan untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan cara melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dan residualnya (S-RESID). Apabila pada titik-titik pada grafik tersebut menyebar secara acak tidak membentuk pola dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah persyaratan dari uji asumsi klasik telah terpenuhi. Dalam penelitian ini variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal skala pengukurannya ditransformasikan kedalam bentuk logaritma

natural. Hal ini dikarenakan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal yang nilainya relatif besar. Adapun model regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

$$\text{LnBM} = a + \beta_1 \text{PE} + \beta_2 \text{LnPAD} + \beta_3 \text{LnDP} + e$$

Keterangan: BM=Belanja Modal, a= Konstanta,  $\beta$ = Koefisien Regresi, LN =Logaritma Natural, PE= Pertumbuhan Ekonomi, PAD=Pendapatan Asli Daerah, DP= Dana Perimbangan, E= Standar Error

### **Pengujian Hipotesis**

#### **Uji Simultan (uji F)**

Uji F dikenal dengan Uji model/ Anova yang digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan atau tidak dan uji ini menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , dimana ditentukan jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan. Jika nilai probabilitas  $\leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan.

#### **Uji Parsial (Uji t)**

Pengujian parsial digunakan Uji t, menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  dimana tingkat signifikansinya ditentukan dengan nilai probabilitas atau dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Uji ini dapat dilihat jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak artinya tidak ada pengaruh antara PE, PAD, dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal. Sebaliknya apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima artinya ada pengaruh antara PE, PAD, dan Dana Perimbangan terhadap belanja modal.

#### **Koefisien Determinasi $R^2$**

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) merupakan ukuran untuk menguji seberapa jauh model regresi mempunyai kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen dengan memiliki nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) antara nol dan satu. Semakin besar nilai  $R^2$  atau mendekati satu menunjukkan pengaruh yang semakin kuat, namun sebaliknya jika semakin kecil nilai  $R^2$  atau mendekati nol berarti menunjukkan pengaruh yang semakin melemah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskriptif Data**

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya berada di bagian Timur Pulau Jawa. Provinsi yang biasanya disingkat dengan JATIM ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah Baratnya dan Provinsi Bali di sebelah Timurnya. Di sebelah Selatan Provinsi Jawa Timur adalah Samudera Hindia, sedangkan sebelah Utaranya merupakan Laut Jawa. Provinsi Jawa Timur didirikan pada tanggal 4 Maret 1950 berdasarkan dasar hukum UU No.2 Tahun 1950. Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah terluas diantara 6 provinsi di Pulau Jawa seluas 47.158 km<sup>2</sup>. Secara administratif Jawa Timur terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota, yang menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.

### **Statistik Deskriptif**

Berikut ini tabel statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**  
*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	108	.008	.174	.05700	.017791
LN_PAD	108	17.90	22.12	19.1482	.79320
LN_DP	108	19.85	21.40	20.7296	.37262
LN_BM	108	18.03	21.30	19.4741	.61013
Valid N (listwise)	108				

Sumber: *Output SPSS.*

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah N sampel sebanyak 108, di mana rata-rata (mean) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 0,05700 dengan jumlah Pertumbuhan Ekonomi terendah sebesar 0,008 dan tertinggi sebesar 0,174 dengan standar deviasi 0,017791.

Rata-rata (mean) jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 19,1482 dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah terendah sebesar 17,90 dan pendapatan asli daerah tertinggi sebesar 22,12 dengan standar deviasi sebesar 0,79320.

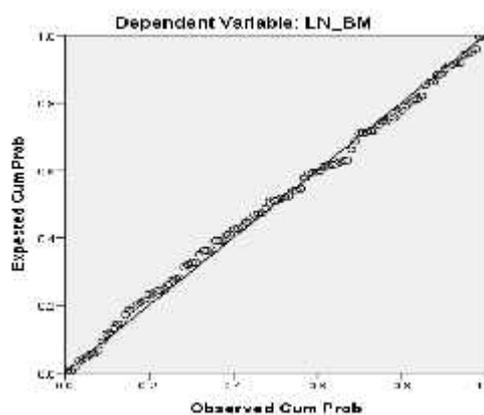
Berdasarkan hasil di atas rata-rata jumlah Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 20,7296 dengan jumlah Dana Perimbangan terendah sebesar 19,85 dan Dana Perimbangan tertinggi sebesar 21,40 dengan standar deviasi sebesar 0,37262.

Belanja Modal memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 19,4741 dengan jumlah Belanja Modal terendah sebesar 18,03 dan memiliki Belanja Modal tertinggi sebesar 21,30 dengan standar deviasi sebesar 0,61013.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Distribusi normal akan membentuk suatu garis diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.



**Gambar 1**  
**Grafik P-Plot**

Sumber: *Output SPSS.*

Pada Gambar 1 grafik normal probability plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. maka disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal.

Hasil ini dapat diperkuat dengan menggunakan pengujian statistik dengan cara melakukan uji one sampel test Kolmogorov-Smirnov. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi akan dipakai lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov- Smirnov lebih besar dari 0,05.

**Tabel 2**  
**Hasil Kolmogorov-Smirnov**

Indikator	Residual
N	108
Kolmogorov-Smirnov Z	0,044
Signifikansi	0,200

Sumber: *Output SPSS.*

Berdasarkan hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 2. Dimana N=108 dan nilai signifikansinya adalah 0,200 yang lebih besar dari tingkat signifikan  $\alpha = 0,05$ , sehingga disimpulkan residual memenuhi asumsi distribusi normal. Hal ini berarti data terdistribusi secara normal, hasilnya konsisten dengan uji grafik normal probability plot yang dilakukan sebelumnya, sehingga model regresi ini memenuhi uji normalitas.

**Uji Multikolinearitas**

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas digunakan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10, maka tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Dari hasil model regresi menghasilkan nilai tolerance dan VIF sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
PE	0,994	1,006
PAD	0,618	1,618
DP	0,621	1,611

Sumber: *Output SPSS.*

Berdasarkan tabel 3, Hasil perhitungan nilai tolerance dari 3 variabel menunjukkan tidak ada variable independen yang memiliki tolerance kurang dari 0,10. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa model regresi tidak mengindikasikan adanya multikolinearitas atau asumsi non multikolinearitas terpenuhi.

**Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier, terdapat korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Pada uji ini menggunakan uji statistic Durbin Watson dengan ketentuan nilai DW berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Durbin-Watson**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

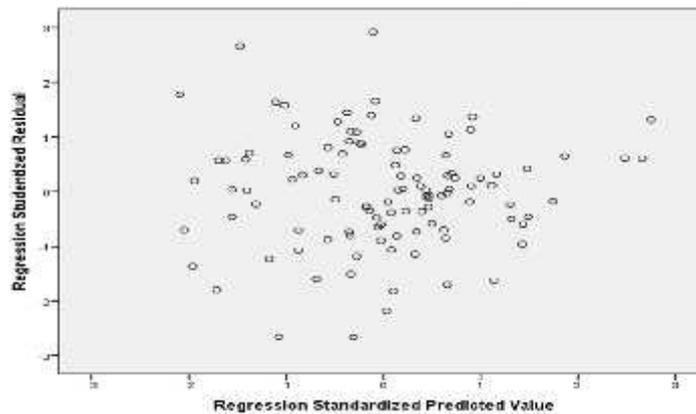
Model	Durbin-Watson
1	1,140

Sumber: *Output SPSS.*

Berdasarkan tabel 4, diketahui nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,140 terletak antara -2 sampai dengan +2 maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi mengindikasikan tidak adanya autokorelasi atau asumsi bebas autokorelasi pada model terpenuhi.

**Uji Heterokedastisitas**

Apabila pada titik-titik pada grafik tersebut menyebar secara acak tidak membentuk pola dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Gambar 2**  
**Grafik Scatter Plot ZPRED dan SRESID**  
**Sumber: Output SPSS.**

Berdasarkan gambar 2, scatter plot di atas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi yang digunakan, dengan demikian asumsi non heterokedastisitas terpenuhi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Dari data yang diolah dengan menggunakan SPSS 23 diperoleh hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-3.031	1.641		-1.847	.068
	PE	-1.651	1.619	-.048	-1.020	.310
	LN_PAD	.422	.046	.548	9.154	.000
	LN_DP	.701	.098	.428	7.166	.000

a. Dependent Variable: LN\_BM

Sumber: *Output* SPSS.

Dari hasil output SPSS 23 seperti yang pada tabel 5 diatas, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$BM: -3,031 - 1,651PE + 0,422LnPAD + 0,701LnDP + e$$

### Uji Hipotesis

#### Uji Simultan (Uji F)

Uji F dikenal dengan Uji model/ Anova yang digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan atau tidak dan uji ini menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Timur selama periode 2013-2015. Dari hasil model regresi menghasilkan nilai F sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	30.659	3	10.220	115.861	.000 <sup>b</sup>
	Residual	9.173	104	.088		
	Total	39.832	107			

a. Dependent Variable: LN\_BM

b. Predictors: (Constant), LN\_DP, PE, LN\_PAD

Sumber: *Output* SPSS.

Berdasarkan nilai statistik pada tabel 6, hasil regresi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah di Jawa Timur periode 2013 - 2015 dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 115,861 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikan  $\alpha = 5\%$ , maka dapat disimpulkan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal.

### Uji Parsial (Uji T)

Uji t bertujuan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dengan tujuan mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Variabe	Koefisien	T	Sig.T
Konstanta	-3,031		
PE	-1,651	-1,020	0,310
PAD	0,422	9,154	0,000
DP	0,701	7,166	0,000

Variabel Dependen: BM

Sumber: *Output* SPSS.

Dari tabel 7, diperoleh nilai t-hitung untuk variabel PE sebesar -1,020, untuk variabel PAD sebesar 9,154 dan untuk variabel DP sebesar 7,166. Pengujian ini dapat dilihat dari nilai signifikansi. Pada tabel *coefficients* bahwa nilai Sig. dari variabel PE sebesar 0,310 maka  $0,310 > 0,05$  dan variabel PAD sebesar  $0,000 < 0,05$  dan variabel DP sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, dan DP berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan variabel PE tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berikut perhitungan yang telah dilakukan tingkat koefisien determinasi berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>	
Model	Adjusted R Square
1	.763

Dependent Variable: LN\_BM

Sumber: *Output* SPSS.

Pada tabel 8, menunjukkan bahwa Koefisien Determinasi yang ditunjukkan dari nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,763 yang berarti 76,3% variasi atau perubahan dalam belanja modal

dapat dijelaskan oleh variabel independen PE, PAD dan DP sedangkan sisanya sebesar (100% - 76,3% = 23,7%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Koefisien korelasi berganda digunakan untuk mengukur keeratan hubungan secara simultan antara variabel independen yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan, secara bersama-sama terhadap Belanja Modal. Koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,763 atau 76,3% yang menunjukkan antara variabel independen atau variabel bebas tersebut terhadap belanja modal.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t terhadap Hipotesis 1 dalam penelitian ini yaitu untuk membuktikan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Jawa Timur. Dari tabel tersebut terlihat untuk variabel independen Pertumbuhan Ekonomi bahwa memiliki nilai koefisien regresi sebesar -1,651 dan nilai t hitung sebesar -1,020 dengan nilai signifikansi sebesar 0,310 yang berarti nilai signifikansi Pertumbuhan Ekonomi ini lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,310 < 0,05$ ). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak. Dengan diterimanya H<sub>0</sub> menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah di Jawa Timur.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat pula belanja modal, begitu pula sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi semakin rendah maka belanja modal juga semakin rendah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Namun pada data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2013 – 2015 dapat dilihat angka pertumbuhan ekonomi yang setiap tahun menurun meskipun anggaran belanja modal setiap tahunnya meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang lambat hal ini dapat terjadi karena beberapa indikator ekonomi yaitu inflasi, ekspor barang dan jasa dan impor luar negeri yang membuat perlambatan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota yang tampak di hampir semua wilayah Jawa Timur (Badan Pusat Statistik, 2016). Hal ini juga disebabkan oleh, pertumbuhan ekonomi yang lambat tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal.

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t terhadap Hipotesis 2 dalam penelitian ini yaitu untuk membuktikan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Jawa Timur. Dari tabel tersebut terlihat untuk variabel independen Pendapatan Asli Daerah bahwa memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,422 dan nilai t-hitung sebesar 9,154 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah ini lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ). maka dapat disimpulkan bahwa H<sub>1</sub> diterima atau H<sub>0</sub> ditolak. Dengan diterimanya H<sub>1</sub> menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dengan belanja modal sebagai variabel dependen. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang

dihasilkan maka semakin meningkat pula belanja modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Alasan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dikarenakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu peranan Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi masing-masing daerah yang dimiliki. Salah satunya dengan cara memberikan anggaran belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan dan perawatan infrastruktur. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan dana pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah selama kurun waktu tahun 2013-2015 telah digunakan secara tepat untuk membiayai pembangunan daerah maupun peningkatan sarana prasarana dengan meningkatkan alokasi belanja modal dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik. Antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah seperti besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya pendapatan asli daerah, atau semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula belanja modal.

### **Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil uji t terhadap Hipotesis 3 dalam penelitian ini yaitu untuk membuktikan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Jawa Timur. Dari tabel tersebut terlihat untuk variabel independen Dana Perimbangan bahwa memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,701 dan nilai t hitung sebesar 7,166 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikansi Dana Perimbangan ini lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima atau  $H_0$  ditolak. Dengan diterimanya  $H_1$  menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel independen yaitu Dana Perimbangan dengan belanja modal sebagai variabel dependen.

Alasan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dikarenakan sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih bergantung terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah pusat yang nilainya cukup besar dalam memenuhi semua pembiayaan dan belanja daerah terutama kebutuhan belanja modal Pemerintah Daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Dana perimbangan diharapkan menjadi sebuah modal dalam rangka menciptakan pemanfaatan yang lebih baik bagi setiap Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jika dana dialokasikan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana atau upaya perluasan lapangan pekerjaan, maka hal ini akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dengan terjadinya pelayanan publik yang lebih baik. Kondisi ini terlihat dari rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki proporsi dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang lebih besar daripada proporsi total pendapatan daerah itu sendiri. Tentunya kondisi ini juga tidak sejalan dengan kemandirian dalam program otonomi daerah. Maka untuk itu meningkatkan

kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk semakin optimal untuk menggali potensi pendapatan asli daerah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu, pertama, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, maka hal tersebut memungkinkan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal meskipun setiap tahunnya belanja modal terus meningkat. Kedua, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat pula Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama pada pemerintah daerah yang berasal dari kekayaan daerah itu sendiri. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah dan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat di daerah. Ketiga, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih bergantung pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat yang nilainya cukup besar dalam memenuhi semua pembiayaan dan belanja daerah terutama kebutuhan belanja modal Pemerintah Daerah.

### **Saran**

Saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur diharapkan lebih mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD. Serta dapat menggunakan PAD dengan sebaik mungkin guna meningkatkan belanja modal dikarenakan PAD masih banyak digunakan untuk alokasi belanja lainnya yang kurang memberikan manfaat. Belanja modal yang digunakan harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan mampu menghasilkan income bagi daerah, diharapkan mampu mengelola dengan baik Dana Perimbangan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat agar Belanja Modal setiap periodenya dapat meningkat, dan juga diharapkan mampu mengoptimalkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi agar tercipta keseimbangan yang baik antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan mengkaji lebih mendalam terkait aspek kualitatif sehingga dapat dinilai sehingga dapat dinilai tingkat efektifitas kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD serta menggunakan rentang tahun yang lebih banyak dan menggunakan objek yang lebih luas, sehingga objek yang di teliti tidak hanya Kabupaten/Kota di Jawa Timur saja, namun untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, dan variabel yang digunakan dalam penelitian selanjutnya, diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen maupun dependen lain baik ukuran-ukuran atau jenis penerimaan pemerintah

daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2011 – 2015. Oktober. BPS Jawa Timur. Surabaya.
- Darise, N. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah : Pedoman Untuk Eksekutif Dan Legislative Rangkuman 7 Undang –Undang, 30 Peraturan Pemerintah Dan 15 Permendagri*. Edisi 2. PT Indeks. Jakarta.
- Darwanto dan Y. Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Kadafi, M., E. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung). *Skripsi*. Universitas Widyatama. Bandung.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Kusnandar, dan D. Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  
\_\_\_\_\_ No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indah. Jakarta.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Soekarwo. 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
\_\_\_\_\_ Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.